

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Bangsa yang majemuk, artinya Bangsa yang terdiri dari beberapa suku bangsa, beranekaragam Agama, latar belakang sejarah dan kebudayaan daerah. Di antara Masyarakat keturunan Asing, Tionghoa merupakan salah satu komunitas etnis di Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia . Mereka hidup mengelompok dalam jumlah yang cukup besar jika di dibandingkan dengan warga asing yang ada di Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan masyarakat pribumi jumlah etnis Tionghoa di Indonesia relatif kecil yaitu 3% dari seluruh penduduk Indonesia. (Suryadinata, 1984: 65).

Keberadaan masyarakat China di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan jauh sebelumnya juga sudah ditemukan jejak-jejak keberadaannya. Sejak ratusan tahun lalu sudah terjalin hubungan antara berbagai kerajaan lokal di Nusantara dengan kerajaan Tionghoa Artinya sejak lama kepulauan Nusantara merupakan negeri yang di kenal luas di kalangan bangsa lain. (Coppel,1994: 21)

Bangsa Cina mendarat di Indonesia pada abad ke 5, di pesisir pantai Jawa Timur. Mereka adalah pedagang yang berlayar untuk mencari rempah², dan kemudian karena satu dan lain hal, mereka menetap di Indonesia dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Awal kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia melalui migrasi, Para imigran dari daratan Tionghoa hampir menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke nusantara. Indonesia tidaklah lepas dari kondisi sosio-kultural negeri Cina sendiri dimana pada kondisi dan situasi

yang menuntut mereka untuk melakukan perpindahan ke wilayah yang mampu menjadikan hidup mereka lebih baik.

Etnis Tionghoa adalah etnis pendatang dalam hal ini terkait dengan eksistensi Cina perantauan di Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara yang menjunjung keberagaman dan perbedaan. Tidak lepas secara historisitas kehadiran bangsa Cina, terutama apa yang kemudian disebut Tionghoa Perantauan di Asia Tenggara. Aktifitas mereka tiada lain adalah berdagang dan bisnis.

Cina sebagai negeri yang berpenduduk terbesar pertama di dunia, dan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi tiap tahunnya, sempat mengalami krisis ekonomi semenjak kepemimpinan komunis-totaliter Mao-Zedong. Tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Sehingga saat itu cukup banyak warga Cina yang secara sembunyi-sembunyi, maupun terang-terangan mengelana ke dunia luar khususnya ke Indonesia sebagai suatu daerah yang ‘mumpuni’ untuk dijadikan lahan hidup mereka. Cina berkesempatan menapaki diri di Indonesia etnis Cina membuka usaha yang telah menjadi keahlian turun-temurun mereka yaitu berdagang dan bisnis. Lahan yang subur seperti Indonesia menjadi arena yang cukup memadai untuk membuka investasi awal warga Cina peranakan maupun asli dikemudian hari.

Faktor pendorong perpindahan bangsa Cina ke wilayah Asia Tenggara, yaitu kondisi negeri Cina telah terjadi kelaparan dan pergolakan di Cina serta faktor penariknya ialah eksploitasi Barat di Asia Tenggara yang menyebabkan arus masuk besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. (Dr. Leo Suryadinata, 1999)

Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari kata-kata bahasa kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, dan artinya adalah orang Cina dan negara Cina istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965. Istilah Cina untuk menyebut orang Tionghoa dan negeri leluhurnya mulai dipakai pada masa orde baru setelah Seminar Angkatan Darat II, di Bandung pada tahun 1966, dengan maksud untuk menghina negara Cina komunis. Sebelum orde baru masih menggunakan istilah Tionghoa dan Tiongkok yang digunakan untuk menyebut orang Cina dan negara Cina. (Leo Suryaninata, 1999).

Dari sudut kebudayaan orang Tionghoa Indonesia terdiri dari peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu atau dua generasi dan masih berbahasa Cina. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah totok sudah menurun dan keturunan totok pun mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan apalagi mereka yang ada di pulau Jawa. (Leo Suryaninata, 1999 : 252).

Sejak Indonesia merdeka etnis Cina di anggap banyak menimbulkan masalah bagi Indonesia, dan masalahnya tidak selalu sama, mula-mula mereka dianggap proBelanda dan anti nasionalisme Indonesia, hidup mereka pun eksklusif dan kerjanya hanya mencari keuntungan di kalangan pribumi yang baru merdeka. Kemudian etnis Cina ini di anggap komunis atau simpatisan komunis. Dan banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di negeri ini. (Suryadinata, 2002: 18)

Kedatangan Orang Cina merantau dengan tujuan untuk mencari nasib peruntungan yang baik. Hal ini dilakukan orang Cina karena didorong oleh keadaan aspek ekonomi, terutama oleh karena kehidupan yang serba seret akibat dari padatnya penduduk, sehingga sedikit memberikan kemungkinan bagi usaha mata pencahariannya. Seiring dengan meningkatnya ekonomi masyarakat pendatang yaitu etnis Cina, berbanding terbalik dengan masyarakat pribumi, sehingga banyak kebijakan pemerintah yang mengatur sendi-sendi kehidupan Etnis Cina di Indonesia.

Tujuan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan kepada etnis Tionghoa yaitu untuk membatasi orang-orang Tionghoa yang terlalu banyak jika di bandingkan dengan warga asing yang ada di Indonesia jumlahnya yaitu sebanyak 3% dari seluruh penduduk Indonesia. (Leo Suryadinata, 1999).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang di undang-undang kan pada tahun 1958 tidak berjalan dengan baik dikarenakan Dengan adanya “sistim aktif”, akan makin banyak etnis Tionghoa yang jadi asing. Karena banyak etnis Tionghoa yang jauh dari kota dan yang tidak mampu untuk membayar surat-surat yang diperlukan untuk jadi Warganegara Indonesia. Sehingga pada tahun 1969 perjanjian yang mengikat antara pemerintahan Indonesia dengan etnis Cina tentang perjanjian dwi kewarganegaraan dihapuskan .

Pelaksanaan kebijakan pemerintah RI tentang dwi kewarganegaraan antara Indonesia dengan Cina berdampak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia, pada bidang ekonomi memburuknya perekonomian Indonesia dimana tingkat inflasi mencapai 650% merupakan faktor yang mendorong lengsernya pemerintah Soekarno pada tahun 1965. Pada

bidang sosial budaya pada masa orde baru secara sosial politik kebijakan kepada etnis Cina dirahkan keasimilasi yang intinya menghilangkan identitas kecinaanya dan pemisahan antara Cina WNA dengan WNI. Mulai dari penggantian istilah Tionghoa menjadi Cina, dan pemisahan antara WNA dan WNI pelarangan pendiri sekolah Cina. Pelarangan perayaan-perayaan di tempat umum sampai dengan pelarangan penggunaan aksara Cina dan publikasi beraksara Cina. Usaha untuk mengasimilasikan orang Cina itu tercermin dalam kebijakan pendidikan, bahasa dan nama Cina. Selama orde baru bahasa Cina tidak boleh dipamerkan dan semua nama toko harus dalam bahasa Indonesia. Selain bahasa Cina yang membahayakan agama dan adat istiadat Tionghoa pun tidak di senangi. Pada tanggal 6 Desember 1967 di keluarkan peraturan presiden yang menyatakan bahwa: agama kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berasal dari tanah leluhur mereka dengan berbagai manifestasinya akan menimbulkan pengaruh yang tidak wajar terhadap kejiwaan mentalitas dan moralitas warga Indonesia. (Suryadinata, 1984: 169)

Dengan faktor-faktor itu pemerintah Indonesia berharap Cina bisa memilih dan menentukan kewarganegaraan yang mereka pilih, dari faktor itu mendorong penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.
3. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya dan memudahkan pembahasan dalam penelitian serta mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa?

1.3 Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan khususnya dibidang pembelajaran Sejarah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi:
 - a. Peneliti, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, wawasan pendidikan tentang Sejarah.
 - b. Sekolah, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam melakukan pendekatan pembelajaran mata pelajaran Sejarah.

1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian : pendorong lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang
Dwi kewarganegaraan Etnis Tionghoa.
2. Subjek Penelitian : Dwi Kewarganegaraan Etnis Tionghoa di Indonesia
3. Tempat Penelitian : 1. Badan perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi daerah
Lampung.
2. Perpustakaan Universits Lampung.
4. Waktu Penelitian : 2012
5. Bidang Ilmu : Sejarah